

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Gafar Karim, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2001, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta, The Habibie Center.
- Bagir Manan, 2005, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum.
- BN Marbun, 2007, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- CF. Strong, 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Terjemahan dari *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darmansjah Djumala, 2013, *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta.
- F. Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung.
- Gadjong, Agussalim, 2007. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung, Fokusmedia.
- Hilaire Barnet, 2000, *Constitutional and Administrative Law*, Ed. Ke-3, London: Cavendish Limited.
- Jacobus Perviddy Solossa, 2006, *Otonomi Khusus Papua, Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

- Isjwara, 1995, *Pengantar Ilmu Politik*, Cetakan Kesepuluh, Bina Cipta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie, 2001, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta, the Habibie Center.
- _____, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Yarsif Watampane, Jakarta.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Kartasasmita G, 1996, *Pembangunan untuk rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo.
- Kum, Krinus. 2012. Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua, Yogyakarta: Buku Litera.
- Maria Eni Surasih, 2006, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta : Erlangga.
- Mashjur Effendi, 1994, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Nasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Editor, Taftazani, Cetakan I, Jakarta, Habibie Center.
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif (editor). 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, "*Hukum Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah pengantar kearah kajian Sosiologi Hukum*", cetakan kedua, Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Sudiyat, Iman, 2000, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta, Liberty.
- Tambunan, Jonggi, 2017, *Menelisik Sejarah Otonomi Daerah*, Jakarta, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri.
- Ter Haar BZN, 1981, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.Ng Soebakti Poesponoto, PT. Pradnya Paramita.
- Tutik Titik Triwulan, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Al-Arif, M Yasin, *Mengkaji Konstruksi Politik Hukum Pengaturan Otonomi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Arena Hukum, Volume 11, Nomor 1, April 2018.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty, 2016, Volume 13, Nomor 2, *Otonomi Desa dan Efektivita Dana Desa*, Jakarta, Jurnal Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Gus, Priyono. 2016, Pengertian Desa Adat, <http://www.definienda.com/2016/01/pengertian-desa-adat.html>, 19 April 2016.
- I Wayan Arthanaya, *Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Kertha Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011.
- Jati, Raharjo Wasisto, Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia : Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.
- Kedesa.id. 2016. *Penataan Desa Adat* <http://kedesa.id/wiki/lembaga-kemasyarakatan-lembaga-desa-adat-dan-ketentuan-kekhususan-desa-adat/ketentuan-khususdesa-adat/penataan-desa-adat> , 19 April 2016.
- Kasmawati, Andi, *Relevansi Kebijakan Desentralisasi Dengan Konsepsi Negara Kesatuan*, Masalah-masalah Hukum, Jilid 41, Nomor 4, 2012.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006, *Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mohammad A, Musa'ad, "*Kontekstualisasi Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua: Perpektif Struktur dan Kewenangan Pemerintahan*", Jurnal Kajian, Volume 16, Nomor 2, Juni 2011, Jakarta, Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Muin, Fatkhul, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah- Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 1, 2014.
- Pigome, Martha, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945*, Papua, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 2, 2011.
- Rohim, Nur, "*Optimalisasi Otonomi Khusus Papua dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik dan Kekerasan*", Fiat Justisia Jurnal Hukum Volume 8, Nomor 1, Januari-Maret 2014.

Simandjuntak, Reynold, *Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Manado, De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2015.

Sri Utari, 1995, *Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Hasil Penelitian, FH Unud, Denpasar.

Sutrisno Purwohadi Mulyono, *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 43, Nomor 3, Juli 2014.

Thontowi, Jawahir, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Pandecta, Volume 10, Nomor 1, Juni 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung.

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.